

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI OPOSISI
DALAM POLITIK DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

OVI ADIANSYAH

NPM. 1521020152

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

*Penyaji I
Ace with D. setah
8/12-2020*

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI OPOSISI
DALAMPOLITIK DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019**

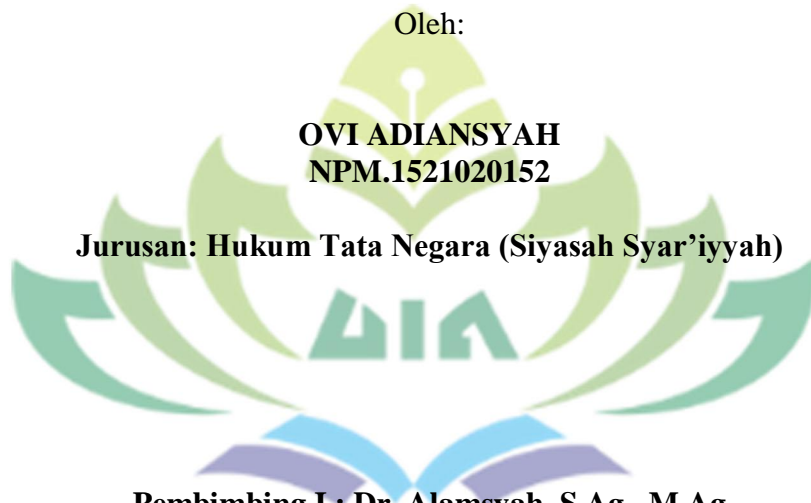
Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**OVI ADIANSYAH
NPM.1521020152**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020**

ABSTRAK

Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam Islam. Negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan *check and balance* sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang, dan partai oposisi adalah sarana untuk menjalankan *check and balance* secara formal di parlemen.

Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran oposisi dalam sistem politik di Indonesia pasca pemilu 2019?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran oposisi dalam sistem politik di Indonesia pasca pemilu 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, dan menggunakan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Oposisi memiliki peran *check and balance* yang diletakkan dalam kerangka konstitusi, format oposisi dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional yang menginginkan perubahan dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, PKS Dan PAN menjalankan perannya dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi dari partai PKS dan PAN, seperti kritik terhadap kenaikan BPJS, kritik terhadap pengangkatan 12 menteri, kritik defisit anggaran, dan kritik mengenai dewan pengawas KPK.

Peran oposisi dalam konteks Indonesia pasca pemilu 2019 dalam hal ini yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dalam rangka untuk menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Tindakan oposisi (*check and balance*) yang dilakukan oleh PAN dan PKS terhadap pemerintah di Indonesia dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional.

Dalam pandangan hukum Islam peran yang dilakukan oleh partai oposisi pasca pemilu 2019 dalam hal ini Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera telah sesuai dengan ajaran Islam, keduanya melakukan tindakan oposisi berdasarkan prinsip Islam yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, terlebih Islam selalu mengajarkan umatnya untuk saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam juga memandang bahwa kepala negara harus dibatasi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

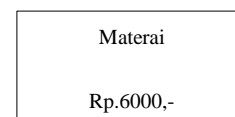
Nama : Ovi Adiansyah
NPM : 1521020152
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2020

Penulis,



Ovi Adiansyah
NPM: 1521020152



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019"

Nama : Ovi Adiansyah

NPM : 1521020152

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

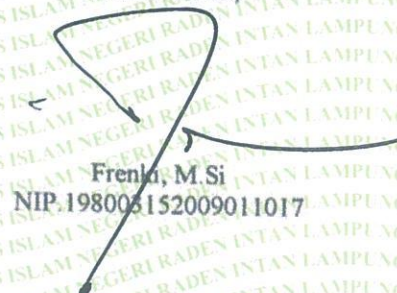
Pembimbing I,

Pembimbing II,


D. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan,


Frenki, M.Si.
NIP. 198006152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019"** Disusun oleh: **Ovi Adiansyah, NPM: 1521020152**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ Tanggal : **Selasa/ 10 November 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM: 196210221993031002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S. Al-Imran [3] 104).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah dan Bunda tercinta Yulianto dan Anita, beserta Kakak tercinta Venny Yulianita Putri, dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ovi Adiansyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 1996 , anak kedua dari pasangan Yulianto dan Anita. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Sukarame, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, SMANegeri 6 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2015/2016.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2020
Yang Membuat,

Ovi Adiansyah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, atasrahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Semoga kita kelak termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019”. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan serta dengan sabar mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
6. Seluruh staf dan karyawan, tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya memperoleh ilmu pengetahuan.
8. Rekan-rekan kelas Siyasah E angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritik, masukan dan saran. Akhirnya semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2020

Penulis,

Ovi Adiansyah
NPM: 1521020152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikansi Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Islam dan Politik Hukum Islam	18
B. Makna Oposisi dan Perannya.....	22

C. Oposisi dalam Dunia Demokrasi.....	30
D. Oposisi dalam Islam	
1. Pandangan Islam terhadap Oposisi	36
2. Pandangan Islam terhadap Demokrasi	46
E. Fungsi-Fungsi Lembaga Politik dalam Islam.....	52
F. Aliran-Aliran Politik dalam Islam	57
G. Tinjauan Pustaka.....	64
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Sejarah Partai Oposisi di Indonesia.....	69
B. Bentuk Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019	
1. Bentuk Peran Oposisi PAN.....	74
2. Bentuk Peran Oposisi PKS.....	81
BAB IV ANALISIS DATA	
Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan salah interpretasi dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah guna memperjelas persepsi, pokok bahasan perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019.”

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Pandangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan pendapat atau menurut, adapun dalam karya tulis ini yang dimaksud pandangan disini ialah pendapat yang bersumber dari hukum Islam mengenai peran partai oposisi dalam politik di Indonesia pasca Pemilu 2019.

Hukum Islam adalah titah Allah swt yang berkaitan dengan aktifitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (perintah dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci yaitu Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasi kepada kedua sumber asasi tersebut.¹

¹Abudin Nata, (ed), *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5.

Peran, ialah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang atau lembaga yang menduduki status tertentu, sejumlah peran disebut sebagai *role-set*.²

Partai oposisi, Dalam ilmu politik definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra tanding (*counter player*) dalam percaturan politik.³

Politik Indonesia, ialah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.⁴

Pasca Pemilu, ialah setelah pemilu, adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.⁵

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

²Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212-213.

³ Damanhuri, "Konsep Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif". (Skripsi Program Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 18.

⁴Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 38.

⁵A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.95.

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Adapun partai politik yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah partai politik yang berperan sebagai oposisi dalam sistem politik di Indonesia pasca pemilu 2019 yaitu PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

PAN (Partai Amanat Nasional) adalah sebuah partai politik di Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998⁷, asas partai ini adalah “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”.⁸

PKS (Partai Keadilan Sejahtera), didirikan di Jakarta pada hari sabtu, tanggal 9 *Jumadil ‘ula* 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002.⁹ Lahirnya partai Keadilan Sejahtera tidak terlepas dari peranan penting partai Keadilan, di mana pada pemilu 1999 Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 partai politik peserta pemilu, dimana hasil tersebut tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold* sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti lambang dan nama. Karena kegagalan tersebut partai keadilan bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera.¹⁰

⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 1 ayat (1).

⁷ Anggaran Dasar Partai amanat Nasional, Bab III Pasal 4 tentang dasar dan asas

⁸ Anggaran Dasar Partai amanat Nasional, Bab I tentang Nama, Waktu, dan Kedudukan, Pasal 1.

⁹ Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Bab I tentang Nama, Asas, Ciri, Kedudukan, dan Atribut, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (On-line), tersedia di : <http://partaipks.id> (diakses tanggal 26 Februari 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan judul, Analisis Politik Hukum Islam terhadap Peran Oposisi dalam Sistem Politik Indonesia pasca Pemilu 2019 adalah menganalisis berdasarkan Politik Hukum Islam terhadap Peran Oposisi dalam Sistem Politik Indonesia pasca Pemilu 2019.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah:

1. Alasan Obyektif

Oposisi adalah salah satu pilar yang menguatkan negara demokrasi karena oposisi memiliki peran *check balance* yang mampu menjaga kelanggengan penyelenggaraan negara demokrasi. Penulis mengangkat judul ini karna oposisi sangat dibutuhkan, karena sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.

2. Alasan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Politik Hukum Islam terhadap oposisi partai politik dalam ketatanegaraan pasca pemilu 2019.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.

- c. Permasalahan yang dipilih oleh penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang

Para *Founding Fathers* Republik Indonesia telah sepakat bahwa ketatanegaraan yang berlaku adalah yang mengakui prinsip-prinsip dasar Demokrasi.¹¹ Demokrasi tidak muncul begitu saja di suatu negara. Demokrasi muncul dan berkembang melalui pikiran dan perjuangan individu, kelompok, dan aktor-aktor sosial Indonesia. Ia lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang lama, sepanjang kehidupan politik negara dari waktu ke waktu.¹² Salah satu komponen negara Demokrasi yang membedakannya dengan negara non demokrasi seperti Sosialis, Komunis, dan Fasis adalah hadirnya unsur Oposisi. Keberadaan oposisi pada dasarnya dibutuhkan, karena ia dapat sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.

Jadi ditinjau peran *check and balance*-nya, oposisi bukanlah sesuatu hal yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi justru dibutuhkan untuk minimal menjaga kelanggengan penyelenggaraan negara demokrasi. Oposisi kerap kali didefinisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang

¹¹ Henry Raymond dan Singgih Agung, *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta : Erlangga 1999), h. 126.

¹² Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Erlangga : Jakarta 2014), h. 14.

dianggap keliru dan salah. Oposisi merupakan bentuk aktualisasi perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Dan adanya perbedaan pendapat itu orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi. Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Kesediaan untuk mengoreksi dan mengkritik, kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik dan kesediaan untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi di Indonesia. Karena itulah menurut pakar politik Arbi Sanit, keberadaan oposisi sebagai soko guru dari sistem demokrasi dan setiap demokrasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposisi mampu menegakkan demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi itu terancam bahkan justru mati karena dalam sistem demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri lantaran kekuasaan cenderung menyimpang. Orang-orang yang sedang berkuasa dapat terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Jadi wajib diawasi dan dikontrol oleh oposisi.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul,

¹³ Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), h. 2-3.

dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu dasar bagi tindakan oposisi, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Menurut Islam, segalasesuatu yang tidak melanggar hukum adalah sepenuhnya diperbolehkan. Dengan demikian tindakan oposisi (*check and balance*) yang dilakukan terhadap pemerintah di Indonesia dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional.¹⁴

Secara umum dapat diketahui ada tiga jenis pengelolaan kekuasaan politik oleh partai politik, yaitu dominasi partai pemenang dengan adanya partai oposisi adalah sebuah realitas politik yang dapat dijumpai ketika partai-partai yang kalah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam koalisi, mampu bersikap resisten dan kritis terhadap dominasi yang dipegang oleh partai pemenang pemilu 2019.¹⁵ Sesuai dengan fungsi partai politik adalah sebagai kontrol politik yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan suatu kebijakan. Partai menjadi wadah bagi pilihan suara rakyat, dengan begitu partai harus mendemonstrasikan pandangan atau visi dan misinya untuk secara terus menerus memperbaiki nasib bangsa dan rakyat Indonesia.¹⁶ Karena partai memperjuangkan suatu kebenaran yang menurut pandangan partai paling idealis dalam suatu level tingkat negara.¹⁷

¹⁴ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta : Ombak 2012), h. 52.

¹⁵ Efriza , *Political Explore*, (Alfabeta : Bandung 2012), h. 301.

¹⁶ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (Erlangga : Jakarta 2001), h. 302.

¹⁷ Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Refika Adi Tama : Bandung 2008), h.78.

Sesuai dengan fungsi dari partai politik sebagai kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melakukan suatu kontrol atau pengawasan partai haruslah berdasarkan kriteria atau norma, sehingga kegiatan pengawasan itu objektif sifatnya.

Melakukan suatu kegiatan kontrol tanpa suatu kriteria yang jelas, maka kontrol tidak akan mempunyai arah. Kriteria suatu kontrol politik adalah nilai-nilai politik yang dianggap ideal oleh masyarakat yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan umum atau peraturan perundang-undangan. Partai politik memiliki salah satu fungsi untuk melakukan kontrol politik dengan memosisikan diri menjadi oposisi. Tujuan suatu kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat menyimpang, dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaan suatu kebijakan sejalan dengan ideologi nasional bangsa Indonesia.¹⁸ Sudah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada di dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada legislatif yang berada di gedung parlemen.¹⁹

Partai sebagai institusi yang selalu menganalisa dan mengawal suatu perubahan sosial juga perlu melihat struktur yang membentuk interaksi sosial. Dalam sistem demokrasi, penting sekali peran pemerintah

¹⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 286.

¹⁹ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2007), h.104.

dalam membentuk struktur dan interaksi sosial. Pemerintah diberi dan memiliki basis legitimasi yang kuat untuk menyusun aturan sosial seperti pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selain itu, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan dan menggunakan cara-cara yang bersifat *coercive* untuk menjamin terlaksananya semua peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan memobilisasi aparat polisi dan angkatan bersenjata, maka kekuasaan pemerintah menjadi lengkap untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengontrol pelaksanaan peraturan yang akan diterapkan. Hal inilah yang menjadi berbahaya jika tidak adanya kontrol politik, karena hukum adalah *dependent variable* (variabel terpengaruh) sedangkan politik adalah *independent variable* (variabel berpengaruh) karena kenyataannya hukum sebagai aturan yang abstrak (pasal-pasal imperatif) merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

20

Sehingga, sudah sewajarnya semua struktur, interaksi, dan kondisi yang ada pada masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengkondisikan, membentuk, dan mengarahkannya. Baik buruk kondisi yang terjadi perlu dikritisi oleh oposisi. Menganalisa setiap perkembangan dalam masyarakat perlu melihat kualitas struktur peraturan yang membentuknya. Sehingga, mau tidak mau, partai Oposisi perlu terus-menerus melihat keterkaitan antara kondisi dan situasi sosial

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 10.

dengan setiap kebijakan dan peraturan pemerintah. Analisa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini sebagai tanggung jawab organisasi, sosial, dan moral dari partai oposisi.

Walaupun Islam menekankan kepada umatnya untuk mentaati *ulilamri* (pemerintah), tetapi ketaatan tidak bersifat absolut. Sebab ketaatan bersifat absolut akan mengakibatkan pemerintahan individualistis, diktator dan totalitas. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada rakyat untuk mentaati pemerintah atau *ulilamri* itu dalam batas-batas tertentu.

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah, kepala negara, atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran salat berjamaah. Imam yang dipilih dalam memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman maupun ketakwaan dari yang lainnya. Dalam salat tersebut, imam memimpin salat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam salah dalam salat, maka makmum dapat melakukan sebuah "koreksi" tanpa mengganggu dan merusak salat itu sendiri.²¹

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h . 241.

berada jauh dari rakyat. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyat dan menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi. Gerakan oposisi di Indonesia yang dilakukan merupakan sikap penentangan terhadap pemerintah yang berkuasa, sikap ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini dalam Islam diperbolehkan untuk menegakkan prinsip *amarna'uf nahimunkar*. hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Al-Imran [3]: 104)

Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam demokrasi Islam. Karena dalam demokrasi Islam hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yaitu Al-Qur'an dan Hadist bukan rakyat atau pemegang kekuasaan. Konsep negara hukum merupakan *basic demand* dari sebuah bangsa. Seluruh negara di dunia ini, tidak

ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya, baik itu yang berbasis komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun lainnya. Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan berbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.²²

Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka merasa selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.²³

Namun partai oposisi di Indonesia saat ini banyak yang tidak menjalankan fungsi kontrol politik, dengan adanya partai Oposisi yang bergabung dengan pemerintahan. Keadaan ini tentunya menjadi titik lemah *check and balance* terhadap pemimpin yang berkuasa. Dalam penyaluran aspirasi kritisnya partai sendiri sebagai partai oposisi cenderung melemah, dengan pecahnya koalisi Adil Makmur dan adanya partai yang bergabung dengan Koalisi Indonesia kerja, hal ini menunjukkan bahwa suatu koalisi yang dibentuk adalah suatu koalisi semu.

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada pandangan hukum Islam terhadap peran partai oposisi dalam politik di Indonesia pasca pemilu 2019.

²²Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila" Jurnal Al-Adalah, Vol 12, No.1, (2014), h.1.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 240-241.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran partai oposisi dalam politik di Indonesia pasca pemilu 2019 ?

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran partai oposisi dalam politik di Indonesia pasca pemilu 2019.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka signifikansi atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Signifikansi secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. Signifikansi secara Praktis yaitu:

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a) Jenis penelitian

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Librabry Research*), Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.²⁵ Data diperoleh dengan cara mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Analisis Politik Hukum Islam terhadap Oposisi Partai Politik dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Pemilu 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek darimana data tersebut

²⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h.33.

dapat diperoleh.²⁶ Data pada penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian mendapatkan beban dari tangan kedua dan bukan merupakan data asli dari tangan pertama dilapangan. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, Yaitu bersumber dari UUD 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bersumber pada kamus, ensklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h. 106.

diperoleh dari mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, dan yang lainnya. Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka serta dokumen maupun sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan agar data tersebut jelas dan tidak meragukan, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Data

Mode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Analisis Politik Hukum Islam terhadap Oposisi Partai Politik dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Dimana metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus.²⁸



²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004),h.127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam dan Politik Hukum Islam

Hukum Islam adalah titah Allah swt yang berkaitan dengan aktifitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (perintah dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci yaitu Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasi kepada kedua sumber asasi tersebut.¹

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *Politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata tersebut berasal dari kata “polis” artinya kota. Politik juga diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Sedangkan secara terminologi politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.²

Dalam bahasa Arab politik disebut dengan istilah *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. *Fiqh* yang membahas masalah itu disebut *Fiqh Siyasah*. Secara terminologis, politik menjadikan syari'at sebagai pangkal

¹ Abudin Nata, (ed), *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5.

² B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 462

tolakkembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasaran, sistem dan jalannya.³

Sebelum membahas lebih jauh mengenai politik hukum Islam, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu tentang politik hukum. Menurut Warkum Sumitro dkk, secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dan bahasa Belanda *recht politiek* yang berasal dari dua kata, *recht* dan *politiek*. *Recht* berarti hukum. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda memiliki pengertian *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Adapun kebijakansendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini politik hukum dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁴

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam terminologi ini, politik hukum mencakup beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut :

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dalam sistem hukum yang ada.

³*Ibid.*, h. 35.

⁴ Warkum Sumitro, dkk, *Politik Hukum Islam* (Malang, UB Press : 2014), h. 13.

2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kapan hukum itu harus diubah dan dengan cara apa perubahan itu dilakukan.
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁵

Selanjutnya politik hukum menurut Mahfud MD merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semua itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.⁶

Mengenai definisi dari politik hukum Islam, Dalam term politik Islam, politik identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang memiliki arti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy dalam bukunya *Al-Siyasah al-Sya’iyyah* menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Secara khusus siyasah bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu

⁵ Sajipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Iakti: 2001), h. 352.

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), h. 162.

mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyasah syar'iyah* dengan pengertian sederhana, yaitu pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.⁷

Sementara para fuqaha mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.⁸

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam meliputi akidah dan syariat, *ad Diin wa Daulah*. Hal itu sangat berbeda dengan agama-agama lainnya. Karena agama lain hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tetapi tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial, sangat berbeda dengan Islam yang bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lainnya.⁹

⁷ Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut, Dar al Arubah: 2001), h. 61

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 31.

⁹ Yana Puspita, "Analisis Politik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 12.

Islam merupakan agama yang komprehensif. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek-aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah *mahdhah* (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad.¹⁰

Dari berbagai uraian tersebut dapat diartikan bahwa politik hukum islam adalah suatu aktivitas dan cara bertindak dalam menentukan suatu kebijakan hukum yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan syari'at maupun dasar-dasar agama.

B. Makna Oposisi dan Perannya

Secara Etimologis oposisi (*Muaradhah*) yang berasal dari kata *aradha* yang berarti mempertemukan, membandingkan, dan menyaingi. oposisi menurut definisi sastra tidak keluar dari akar makna etimologisnya berarti *al-muqabalah* (pertemuanatauperbandingan). Didalamnya juga termasuk *mubarah* (pertandingan) disamping terlihatnya semangat *al-mughalabah* (pertikaian) dan *at-tahaddi* (tantangan).¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oposisi diartikan sebagai partai penentang di dewan perwakilan

¹⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1979), h. 11.

¹¹ Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h.5.

dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.¹²

Menurut Prof. Dr. Nurcholis Madjid dalam bukunya “Dialog Keterbukaan” menyatakan bahwa dalam negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan *check and balance* sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang, sebab dalam pandangan filosofis manusia tak mungkin selalu benar untuk menjalankan *check and balance* secara formal di parlemen adalah partai oposisi. Menurutnya juga, oposisi tidak berarti menentang (*to oppose*) tapi dalam oposisi terkandung unsur mendukung (*to support*). Dalam pandangan Nurcholis oposisi sangat berbeda dengan oposisionalisme adalah menentang sekedar menentang, sangat subjektif dan bahkan iktikadnya kurang baik, seperti kebiasaan mendaftarkan kesalahan orang lain. Sedangkan oposisi dalam semangat loyal, loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal.¹³

Dalam ilmu politik definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra tanding (*counter player*) dalam percaturan politik.

Format oposisi dalam bentuk mengimbangi kekuasaan (*check and balance*) negara yang diletakkan dalam kerangka konstitusi. Format oposisi ini biasa dilakukan oleh partai politik yang menginginkan perubahan atau mengkritisi

¹²Tim Penyusun Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka), h. 628.

¹³Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta, Paramadina, 1999), h.7.

kinerja pemerintahan. Konstitusi mutlak merupakan kata akhir dan perwujudan legitimasi, penyimpangan terhadap konstitusi berarti melampaui batas mandat politik. Pada konteks ini oposisi dapat disebut sebagai sistem kontrol konstitusi. Sistem *check and balance* merupakan sebuah mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap pengekangan kebebasan dan pencekalan dalam mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipiel terhadap tuntutan falsafah sebuah negara atau hak asasi manusia. Peran oposisi partai politik sangat penting untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan secara konsisten, objektif dan berpegang pada kebenaran. Serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Adanya oposisi di parlemen akan mempersempit kemungkinan terjadinya tiranisme dan otoritarianisme.¹⁴

Dalam wacana politik, oposisi ditinjau dari dua aspek yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Pada aspek kultural menekankan bahwa oposisi sudah menjadi sebuah kebutuhan mutlak dalam membangun bangsa kedepan yang lebih baik. Mencermati bukan sekedar turut menyaksikan apa saja yang berlalu didepan mata, akan tetapi siap-siaga untuk melakukan *counterdiscourse* atau gelar wacana tandingan, dialog, kampanye publik, dan lain sebagainya. Perilaku beroposisi seperti ini dapat diperankan oleh siapa saja dan kapan saja. Sedangkan dalam aspek struktural, oposisi dimaknai dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa, namun dengan tidak banyak memproduksi aksi positif, cukup dengan menolak tegas secara moral kebijakan tersebut, untuk selanjutnya menunggu

¹⁴*Ibid*, h. 13.

perkembangan yang akan berlaku. Dengan bahasa lain merupakan oposisi yang miskin strategi dan miskin program, ini sama persis dengan kondisi gerakan oposisi di Indonesia.¹⁵

Jika makna oposisi dikaitkan dalam bidang politik pasti berhubungan dengan salah satu model sistem politik yang mana kehidupan politik dibagi menjadi dua pihak, salah satunya berada dalam pemerintahan dan disebut sebagai pemerintah dan yang lain berada diluar pemerintah yang disebut dengan oposisi. Dengan begitu, orientasi makna kata tersebut tertuju pada struktur yang ada diluar pemerintah, apapun bentuknya. Bisa jadi ia berbentuk partai, kelompok, atau gerakan. Semua struktur ini berorientasi pada makna kata oposisi sebagai ekspresi kekuatan yang tidak mendukung pemerintah dan yang bersikap menentang atau menolak. Jika kita bertanya mengapa bisa terjadi perkembangan pada maknanya, kita dapati bahwa oposisi meskipun adalah kata yang diambil dari akar orisinil Bahasa Arab, makna kata tersebut pada zaman sekarang sudah berkembang sebagai cermin dari pengaruh budaya asing (barat) yang mana diantara makna kata tersebut ada kesamaan dengan sejumlah makna yang disinyalir oleh kata *opposition*, khususnya pada bidang politik.¹⁶

Dalam terminologi dapat di simpulkan bahwa arti epistemologi oposisi pada dasarnya lebih terpusat pada peran dari pada individu yang melakukan peran tersebut. Hubungan pihak manapun dengan peran ini

¹⁵ Ahmad Faizal, "Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim". (Skripsi Program Sarjana Siyasah Jinayah UIN Walisongo, Semarang, 2016), h.23.

¹⁶ *Ibid.*, h.6.

tergantung oleh waktu tertentu. Disana juga terdapat pertukaran antarpihak dalam menjalankan peran tersebut. Dahl mendefinisikan kedua jenis peran oposisi yang dilakukan secara bergantian oleh (A) dan (B) tersebut sebagai oposisi aktif yang efektif dan oposisi pasif. Disisi lain, ada hal-hal lain yang menolak logika pergantian peran seperti yang ada dalam konsep barat diatas.¹⁷

Hal itu karena dalam pemikiran politik Islam sudah mengakar prinsip tidak mencari kuasa. Mencari kekuasaan adalah terlarang atau sesuatu yang tidak disukai. Oleh karena itu, semua gerakan oposisi usahanya ditujukan pada penerapan persepsi masing-masing yang paling ideal dan bukan untuk mencari kuasa. Oposisi dalam pemikiran politik Islam dikenal menjadi dua bentuk, yaitu oposisi aktif dan oposisi pasif. Oposisi aktif terwujud dalam sejumlah sikap individu dan gerakan-gerakan kolektif yang terwujud dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan atau dalam bentuk pemikiran oposisi.

Adapun oposisi pasif terlihat dalam sejumlah sikap beberapa sahabat yang mengasingkan diri dari konflik khilafah yang sedang terjadi. Sikap mereka seperti ini menjadi sandaran bagi beberapa persepsi yang mendukung konsep sabar sebagai metode untuk menyatakan oposisi pasif. Jadi melalui perbandingan ini jelas bahwa makna terminologi barat terhadap kata oposisi bukanlah makna yang terbesit dalam pikiran ketika kita berbicara tentang oposisi dalam pemikiran politik Islam. Hal itu karena

¹⁷ *Ibid.*, h.7.

yang pertama kali terbesit dalam pikiran pada konteks ini adalah oposisi yang dilakukan berbagai faham dan mazhab yang dikenal sepanjang sejarah Islam, seperti Khawarij, Syiah.¹⁸ Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia, oposisi akhirnya muncul dalam beberapa varian konseptual. Saat ini setidaknya ada empat konsep oposisi yang pernah berkembang di berbagai dunia:

1. Oposisi Seremonial

Konsep oposisi yang pertama adalah oposisi seremonial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seremonial dimaknai sebagai sesuatu yang bersikap upacara atau seremoni. Tetapi apabila kita maknai lebih jauh, seremoni dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat resmi dan formal. Berdasarkan definisi tersebut, oposisi seremonial dapat diartikan sebagai konsep 'oposisi tipu-tipu' atau oposisi yang dibentuk hanya untuk formalitas saja. Oposisi seremonial sengaja dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa supaya rakyat melihat sistem pemerintahan yang ada seakan-akan seimbang. Padahal segala hal yang ada pada oposisi seremonial telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah berkuasa. Orang-orang yang berada dalam oposisi, kedudukan, fungsi, hingga keputusan-keputusan yang diberikan telah ditentukan oleh penguasa.

Konsep oposisi seperti ini mungkin akan berhasil mendukung pemerintah di awal-awal masa pemerintahan, namun konsep ini justru

¹⁸ *Ibid.*, h. 10.

dapat menjatuhkan pemerintah ketika rakyat mulai sadar jika selama ini mereka dibodohi. Rakyat yang jengah dan rindu akan perubahan akan memuncak hingga akhirnya membentuk gerakan oposisi non-formal untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat itu.

2. Oposisi destruktif oportunis

Dalam sistem oposisi seperti di Indonesia, oposisi tersebar di antara beberapa partai politik. Dengan demikian sistem multipartai sebagai cara yang wajar bagi pemerintah dan oposisi untuk mengatur konflik yang terjadi. Sejah suatu oposisi memperhitungkan sistem partai dalam memilih strategi, sistem partai yang berbeda-beda haruslah dihubungkan dengan strategi yang berbeda-beda pula.¹⁹

Oposisi destruktif oportunis adalah konsep oposisi yang selalu berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan selalu dikritik dan dicari kesalahannya, bahkan ketika kebijakan tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat. Kelemahan-kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep oposisi destruktif oportunis ini diharapkan dapat merusak kewibawaan penguasa sehingga golongan oposisi dapat melakukan kudeta secara mudah. Tujuan dari golongan oposisi destruktif oportunis ini adalah untuk menjatuhkan penguasa secepat mungkin sehingga mereka dapat mengambil alih pemerintah.

¹⁹Robert Dahl. *Berbagai Pola Oposisi*, dalam buku *Partisipasi dan Partai Politik*, Miriam Budiardjo (penyunting). (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1998) h. 122

3. Oposisi Fundamental Ideologis

Oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak jauh berbeda dengan oposisi kedua, yakni oposisi destruktif oportunis. Kedua konsep oposisi ini sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa supaya dapat digantikan oleh penguasa yang lain. Satu hal yang membuat kedua konsep oposisi ini berbeda adalah adanya unsur ideologi yang dibawa dalam oposisi fundamental ideologis yang seharusnya tidak dilakukan karena tindakan oposisi (*check and balance*) yang dilakukan terhadap pemerintah di Indonesia dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional.²⁰

Konsep oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak sekadar menginginkan adanya penggantian penguasa, namun sampai ke tataran ideologis. Mereka menganggap jika dasar negara yang dianut selama ini tidak tepat, sehingga ingin mengganti dengan dasar negara yang mereka anggap lebih baik. Kaum oposisi fundamental ideologis ini tergerak menjadi oposisi karena dorongan paham. Entah itu bersandar pada religi, sosialisme, komunisme, nasionalisme, pluralisme dan lain lain.

4. Oposisi Konstruktif Demokratis

Kelompok oposisi konstruktif demokratis dapat disebut sebagai konsep oposisi yang paling baik dibandingkan tiga konsep oposisi

²⁰ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta : Ombak 2012), h. 52.

sebelumnya. Konsep oposisi konstruktif demokratis terbentuk sebagai bentuk perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik adalah sebagai kontrol politik yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan suatu kebijakan. Partai menjadi wadah bagi pilihan suara rakyat, dengan begitu partai harus mendemonstrasikan pandangan atau visi misinya untuk secara terus menerus memperbaiki nasib bangsa dan rakyat Indonesia.²¹

Jika tiga konsep oposisi sebelumnya justru berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya akan menggantikan otoritarian lama dengan otoritarian yang baru, maka oposisi konstruktif demokratis berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya.

Konsep oposisi konstruktif demokratis akan melakukan kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai mencederai rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang. Kelompok oposisi konstruktif demokratis tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu. Kelompok oposisi ini hanya akan bertindak ekstrem jika tingkah pemerintahan yang

²¹ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (Erlangga : Jakarta 2001), h. 302.

berkuasa sudah keterlaluan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat tidak dapat dicegah lagi.

C. Oposisi dalam Dunia Demokrasi

Dalam dunia perpolitikan ungkapan "demokrasi" sudah umum dikenal. Bahkan juga dilihat sebagai suatu "nilai" yang mutlak perlu dalam hidup dan bidang kehidupan manusia pada umumnya. Namun lebih jelas lagi, demokrasi sebagai suatu nilai itu diharapkan menjadi sebuah acuan penting dan mendasar dalam sebuah sistem organisasi atau kelompok kerja. Maka selalu diharapkan agar bisa terjadi dan ada demokrasi dalam organisasi kehidupan manusia yang meliputi sektor-sektor hidup apa saja, seperti sektor politik, sosial, dan tatanan masyarakat.

Sebelum menjadi satu nilai yang penting, kata atau ungkapan demokrasi itu bermula dari kata bahasa Yunani yakni "*demokratia*". Kata ini terdiri dari kata *demos* yang berarti rakyat dan kata *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat.

Sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi ini diadopsi dan diterapkan oleh sejumlah negara di dunia ini. Dalam pemerintahan demokratis, rakyatlah pemegang kekuasaan dan sekaligus sebagai pengambil keputusan yang berdampak bagi dan demi kehidupan pemangku kekuasaan demokratis itu sendiri yakni rakyat. Untuk itu, peran aktif rakyat sangatlah penting. Ia berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan menyangkut nasib semua rakyat, tak terkecuali. Tindakan partisipatif itu bisa diwakilkan atau bisa secara langsung.

Merujuk kepada pemahaman dasar dan singkat serta padat tentang demokrasi seperti yang dianut oleh Abraham Lincoln yaitu sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Maka boleh dikatakan bahwa rakyatlah rajanya demokrasi. Jadi seluruh urusan yang menyangkut kepentingan rakyat seluruhnya dan demi kelangsungan hidup bernegara harus diambil bersama dan dengan rakyat. Peran aktif dari rakyat itu ada dan mutlak perlu serta pelaksanaan konkritnya dalam sistem itu, bisa langsung dan atau diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih.

Dalam realitas politik, pengakuan dan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Dalam sistem demokrasi dikenal juga istilah oposisi. Hal ini merupakan satu opsi dari alternatif yang dikarenakan sistem demokrasi itu. Opsi oposisi ini berhubungan dengan keikutsertaan partai-partai politik tertentu dalam bingkai pemerintahan demokratis itu sendiri. Opsi oposisi ini bisa terjadi dan mulai ada sejak dibicarakan konstelasi politik menjelang pemilihan eksekutif di tingkat nasional khususnya pemilu presiden sebagai pesta demokrasi, disana dikenal dengan adanya koalisi partai-partai. Dan ketika dinyatakan pasangan yang unggul atau menang pada saat itu mulai jelas adanya partai koalisi pemerintahan yang berkuasa dan partai koalisi yang menyatakan diri sebagai oposisi. Oposisi sebenarnya merupakan suatu pilihan. Artinya bahwa setiap partai politik yang koalisinya dinyatakan tidak

menang pada konstelasi politik dalam dan melalui ajang pemilu, masih mempunyai kesempatan untuk memilih menjadi partai oposisi atau tidak.²²

Oposisi muncul di luar pemerintahan yang berkuasa, artinya tidak masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan yang berkuasa. Opsi oposisi ini dengan fungsinya melakukan "*checks and balance*" terhadap pemerintahan penguasa. Di situlah terlihat jelas adanya "pemisahan" kekuasaan. Oposisi memang suatu opsi politik tetapi tetap menjadi penting (keniscayaan) di dalam sistem pemerintahan demokratis. Partai-partai oposisi harus menyadari dan memahami tempat dan fungsinya sebagai "*checks and balance*". Itu artinya bahwa perlu dilakukan semacam kontrol dan pengawalan terhadap kerja dan kebijakan pemerintah penguasa supaya tetap berjalan di atas roda utama pemerintahan, yakni demi keberpihakan terhadap rakyat seluruhnya. Itu tidak lain tidak bukan demi perwujudan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang merupakan sila kelima Pancasila.

Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang. Oposisi dalam makna umum kerap diartikan sebagai "berseberangan" atau "sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama pada sesuatu yang lain". Oposisi juga diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik, sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dari ketidakbersetujuan atau kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi.

²² Opsi Oposisi dalam Demokrasi (On-Line), tersedia di : <https://www.kompasiana.com/zakharias/5f0becfcd541df740676fe72/opsi-oposisi-dalam-demokrasi?page=3> (diakses tanggal 17 November 2020)

Tentu saja masih banyak definisi oposisi dan secara literal tidaklah sama. Namun, esensi yang selalu ada dalam makna oposisi adalah terkait dengan sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu.

Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi menurut Dahl (1971) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya sebagai *polyarchy* (poliarki) atau sebetulnya pemerintahan yang bernuansakan demokrasi. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama penyeimbang ini mengingatkan ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.

Kedua, arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang terbaik sekalipun

tetap membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemandulan oposisi, dengan demikian, adalah keterbatasan opsi bagi tegaknya aspirasi rakyat yang, manakala berjalan dalam waktu lama, dapat memunculkan pembusukan pemerintah sebagaimana yang terjadi di Myanmar era junta militer ataupun Indonesia era Orde Baru. Dengan kata lain, oposisi dibutuhkan agar sebuah kebijakan yang lebih komprehensif dapat tercipta dan kesalahan dapat diminimalkan.

Ketiga, arti penting oposisi lainnya adalah sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para *elite* politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya oposisi akan membuat pemerintah yang berkuasa “terjaga” dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik dan pada gilirannya berpotensi “mengganggu” citra positif pemerintah di mata masyarakat. Oposisi, oleh karena itu, diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra baiknya di mata masyarakat. Dalam situasi ini, muncullah situasi kompetisi yang sehat antara pemerintah dan oposisi menuju perbaikan demi perbaikan.

Oleh karena itu, jelas bahwa penguatan oposisi terkait dengan upaya menegakkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal

berbeda, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.²³

D. Oposisi dalam Islam

Sejauh perkembangan historis masyarakat dunia, dinamika antara berbagai sudut pandang merupakan hal yang sulit untuk dihindari dalam bidang-bidang kemanusiaan. Oleh karena itu dewasa ini masyarakat selalu mengenal fenomena oposisi dengan berbagai coraknya. Islam merupakan agama rahmat bagi semesta alam yang mengatur kepada setiap aspek kehidupan manusia dengan sangat rinci, bukan hanya kehidupan beragama, Islam juga mengatur aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik, supaya manusia tidak tersesat dan tetap menjalankan segala perintah Allah dan terhindarnya dari kemudharatan.

1. Pandangan Islam terhadap Oposisi

Dalam bahasa Al-Qur'an, mungkin sulit ditemukan suatu lafaz yang langsung mempunyai makna oposisi, namun dengan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an akan dijumpai beberapa konsep, apabila oposisi difahami sebagai alat untuk mengontrol kinerja pemerintah atau penyeimbang, atau sebagai alat yang berfungsi memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan suatu negara atau terciptanya kemaslahatan umum bagi seluruh warga Negara.

Oposisi tidak hanya diartikan sebagai penantang kebijakan pemerintah saja, tetapi juga sebagai bagian dalam sistem berdemokrasi untuk memberikan

²³ Firman Noor, "*Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi*" Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 42, No. 1, 2016, h. 5.

kitik, saran, dan nasehat kepada pemerintah. Demokrasi dan oposisi yang bermakna tersebut tidak dapat dipertanyakan dengan Islam. Teks-teks AlQur'an ataupun Hadis Nabi saw. banyak mengisyaratkan dan menuntun kearah tersebut walaupun secara literal tidak dijumpai dalam AlQur'an lafadz demokrasi dan oposisi, namun substansi dalam demokrasi dan oposisi yang tercermin pada kewajiban melaksanakan *amar makruf dan nahi munkar*.²⁴

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa sebagai muslim kita senantiasa dituntut untuk taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin, tetapi pernyataan itu segera disusul dengan satu klausul politik selama para penguasa tidak menyeleweng, artinya ketika para pemimpin melakukan perbuatan maksiat (kepada Allah dan Rasul-nya), maka tidak ada ketaatan lagi kepadanya. Dalam konteks ini, umat diperkenankan bahkan diharuskan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para pemimpinnya.

Menurut perspektif Islam, oposisi tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan ataupun mengganggu pemerintahan yang sedang berkuasa, namun lebih kepada bersikap tegas, tidak kompromi terhadap kedzaliman, sikap tegas ini mengandung konsekuensi berani mengatakan "tidak" jika salah dan berani mengatakan "benar" jika memang benar adanya. Atas dasar inilah, maka termasuk bagian tegas ini adalah tidak malu mendukung kebijakan pemerintah jika dipandang tepat, dan sebaliknya tidak takut untuk mengkritik suatu kebijakan jika dipandang salah.

²⁴ Muhammad Syarif Hasyim, "Oposisi Perspektif Al-Qur'an" Jurnal Rausyan Fikr Vol. 12, No. 2, 2016, h. 293.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap hak rakyat, pelanggaran terhadap amanat rakyat. Penyimpangan dari keadilan dan menghilangkan kebebasan manusia, maka diperlukan partai politik atau kelompok yang independen yang mengawasi jalannya pemerintahan di dalam birokrasi untuk selalu objektif dalam menilai setiap kebijakan yang dibuat.²⁵

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran sholat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashaha* maupun ketakwaan yang lainnya. Dalam sholat tersebut imam berdiri memimpin sholat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam sholat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak sholat itu sendiri.²⁶

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus mendengar dan menjawab

²⁵ Ahmad Faizal, "Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim". (Skripsi Program Sarjana Siyasah Jinayah UIN Walisongo, Semarang, 2016), h.28.

²⁶ Iqbal, Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h.240-241.

aspirasi rakyatnya dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syiah Ismailiyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.²⁷

Contoh terbaik tentang kepala negara adalah Rasulullah Muhammad Saw. dan setelah itu diperlihatkan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadiim al-Ummah* (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat Islam. Namun pada masa pemerintahan Usman pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya.²⁸

Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 H/ 655 M, Usman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah kebijakan yang mengangkat keluarga

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.241.

²⁸ Mohammad Adnan, "Wajah Islam Periode Makkah-Madinah dan Khulafaurrasyidin" *Cendikia Junal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 1, 2019, h. 99.

dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibn Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Usman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan penting, Usman laksana boneka dihadapan kerabatnya itu. Ini lah yang menyebabkan rakyat kecewa dan membentuk gerakan oposisi tokoh sahabat yang terkenal mengkritisi kebijakan Usman adalah Abu Dzar Al-Ghifari dia menentang Usman karena nepotisme dan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam pemerintahannya.²⁹

Pasca pembunuhan Usman, suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan *baiat* kepada Ali. Di Syam, Mu'awiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Sikap oposisi atau perlawanan Mu'awiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai tandingan di Syam. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Adapun di Mekkah, Aisyah menggalang kekuatan pula bersama Thalhah dan Zubeir untuk melawan Ali. Namun demikian, Ali tetap dianggap sah menduduki jabatan khalifah, karena didukung oleh sebagian besar rakyat. Meskipun banyak pihak yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Ali.³⁰

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo 2011), h.39.

³⁰ Iqbal, Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h.86.

Dalam konteks *Amar Makruf Nahi Munkar* terdapat kandungan Konstitusi Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw. mengandung asas tersebut, ditetapkan dalam Konstitusi Madinah sebagai asas pemerintahan Negara Madinah, asas hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Asas ini di pahami dan dirumuskan dari ketetapan yang menyatakan: Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan atau perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentangnya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang mereka (Pasal 13). Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus (Pasal 20).³¹

Asas ketetapan ini menekankan pada hubungan baik dan harmonis orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan orang-orang mukmin dengan pencipta sebagai perwujudan takwanya tercermin pada menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk tujuan itu, orang-orang mukmin yang bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Tentu saja yang

³¹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h.117.

dimaksudkan klausa ketetapan Pasal 20 adalah berpedoman pada petunjuk wahyu Allah.³²

Wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. yang seluruhnya dikenal dengan Al-Qur'an sedangkan cerminan ketakwaan orang-orang mukmin dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain atau dengan masyarakatnya, harus saling memberi saran dan nasehat dan berbuat kebaikan tanpa dosa (Pasal 37). Keharusan ini disebut tugas *Amar Makruf*. Mereka juga, menurut Pasal 13 di atas harus mencegah dan menentang segala macam tindak kejahatan, yang disebut dengan tugas *Nahi Munkar*. Artinya, Pasal 13 dan 20 itu menghendaki orang-orang mukmin bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan takwa, dan mencegah segala macam bentuk kejahatan. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada orang mukmin agar bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan tidak bekerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³³

Ketetapan Konstitusi Madinah diketahui bahwa sifat ketakwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah untuk bertakwa kepada-Nya. Kedua, dimensi sosial, yaitu menegakkan *Amar Makruf* dan *Nahi Munkar* demi terwujudnya ketertiban sosial. Oleh karena itu, asas ketakwaan, *Amar Makruf* dan *Nahi Munkar* sebagai asas negara Madinah menuntut masyarakatnya disamping bertakwa kepada Allah,

³² *Ibid.*, h.118.

³³ *Ibid.*, h. 119.

juga harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas *Amar Makruf* maupun untuk tugas *Nahi Munkar*. Tipe masyarakat dan pemerintahan seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu negara yang masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa dan mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya.³⁴

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. karna dalam setiap kesusahan pasti akan datang kemudahan, sebagaimana dalam kaidah Fiqiyah :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Seperti yang kita ketahui, bahwa partai politik seperti PAN dan PKS memiliki beberapa fungsi dan peran yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik yang dilakukan oleh PAN dan PKS adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghadapi segala kesulitannya, untuk mencapai tujuan yang

³⁴ *Ibid.*, h. 120.

diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, dimana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya partai politik ini masyarakat Indonesia semakin mengenal pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik adalah :

- Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah :

- Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Kemudian jika menilai apakah partai politik oposisi sudah menjalankan perannya sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagai berikut:



وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقٌ, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya: “Apabila sesuatu menjadi sempit, maka menjadi luas, Dan jika sudah luas, maka kembali sempit”

Adapun kondisi sempit yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah kemungkinan kecil untuk menjalankan aturan hukum ketika suatu hukum

syariat yang berlaku menjadi alasan pembebanan bagi mukallaf untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵

Dalam suatu negara demokrasi kepentingan rakyat merupakan kepentingan yang paling utama, dengan demikian pemerintah dalam segala kebijakannya hendaknya selalu mementingkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, atas dasar tersebut terkait dengan kritik yang dilakukan oleh partai politik yang berperan sebagai partai oposisi sudah selayaknya melakukan hal tersebut jika kebijakan yang diambil pemerintah terbilang kurang mementingkan kepentingan rakyat. Karena substansi dari aturan hukum itu sendiri untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang sekiranya kebijakan tersebut dapat merugikan rakyat atau tidak pro terhadap rakyat partai oposisi dalam perannya berhak mengkritisi kebijakan tersebut atas dasar kepentingan rakyat pula, hal tersebut dapat dianalogikan dengan keadaan sempit yang dimaksud dalam kaidah tersebut karena kesejahteraan dan kepentingan rakyat merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi.

Kemudian sebaliknya jika kebijakan yang diambil pemerintah tersebut terbilang telah sesuai dan tidak mencederai kepentingan rakyat partai oposisi dalam perannya melaksanakan oposisi tidak sepatutnya mencari-cari kesalahan terhadap kebijakan tersebut dalam upaya menjatuhkan pemerintahan.

³⁵ Hikmiyah, "Aplikasi Kaidah Fikih Idza Daqa Al-Amr Ittasa'a dalam Sumber Hukum Materil Keluarga Islam Indonesia". (Skripsi Program Sarjana Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h. 17.

Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang yang diharamkan. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang diridhoi Allah. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya. Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya, dan tidak menutup kemungkinan pemimpin ataupun kepala negara keliru dalam mengambil suatu kebijakan, dan dapat dilakukan koreksi terhadapnya.

2. Pandangan Islam terhadap Demokrasi

Berbicara mengenai oposisi tidak dapat terlepas dari istilah demokrasi, oposisi sendiri merupakan bagian dari sistem demokrasi. Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, oposisi dianggap sesuatu yang sangat diperlukan, sebab oposisi menjalankan suatu fungsi yang sangat vital dan penting yaitu check and balances, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif.

Adapun demokrasi dalam Islam terdapat beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Demokrasi dalam Islam masih diperdebatkan oleh ulama antara pro dan kontra. Bagi kalangan yang menerima menganggap bahwa demokrasi bukanlah suatu yang dipermasalahkan; Fahmi Huwaidi dalam bukunya *al-Islam wa al-Dimoqrathiyah* menyebutkan beberapa pandangan ulama yang menerima demokrasi sebagai suatu sistem dalam mengelola suatu Negara. Bagi yang menolak, tidak memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdiri atas kebebasan, partisipasi politik, dan multi partai saja, tetapi memandangnya sebagai simbol dari proyeksi barat yang menjajah dan mengambil hak-hak muslim, serta alat/media untuk menghina Islam. Sebaliknya, bagi yang menerima memandang demokrasi sebagai sistem yang mengatur cara bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, tidak dengan cara memaksakan seseorang atau sistem yang mereka tidak senangi, mereka mempunyai hak mengoreksi bila pemimpin salah, dan hak untuk menurunkannya apabila telah menyimpang.³⁶

Menurut Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurut nya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurut nya Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).

³⁶ Fahmi Huwaidi, *al-Islam wa al-Dimoqrathiyah* (Cet. I; Cairo: Markaz al-Ahram littarjamah wa al-Nasyr, 1413 H.-1993 M.), h. 136.

Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan *amar makruf dan nahi mungkar* serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.

Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak. Berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga mereka harus

memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.³⁷

Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama yaitu M. Iqbal, menurut beliau sejalan dengan kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya menurut M. Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, M. Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh M. Iqbal bukan demokrasi, melainkan prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu M. Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: 1) Tauhid sebagai landasan asasi; 2) Kepatuhan pada hukum; 3) Toleransi sesama warga; 4) Tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit; 5) Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

³⁷ Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat" Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Vol. 5, No. 2, h. 56.

Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama yaitu M.Iqbal, menurut beliau sejalan dengan kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich, melainkan prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: 1) Tauhid sebagai landasan asasi; 2) Kepatuhan pada hukum; 3) Toleransi sesama warga; 4) Tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit; 5) Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hokum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hokum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang

tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi Allah berposisi sebagai Al-Syari (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman dalam (surat Al-Araf: 54). Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Inilah batasan yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Sebagai pakar tafsir Prof. Quraish Shihab menyatakan tidak benar kalau orang selalu bicara bahwa dalam Islam tidak ada demokrasi. Dalam Islam yang dinamakan syura adalah pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Jadi, orang-orang demokrasi itu dipersamakan dengan lebah yang menghasilkan madu. Lebah punya keistimewaan, dia tidak makan kecuali yang baik. Dia tidak mengganggu. jika dia menyengat, sengatnya obat, hasilnya selalu baik, bermanfaat, itulah yang dicari. Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang kita kenal pilar dalam Islam dengan syura atau dipadankan dengan demokrasi. Di tengah masyarakat ada anggapan bahwa Islam jauh dari demokrasi. Karena Islam sering dibenturkan dengan

demokrasi. Padahal sesungguhnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi justru menyaratkan demokrasi. Islam jelas bukan hanya mendukung, dia mensyaratkan. Kalau mendukung ini seakan akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya demokrasi yang diajarkan Islam justru lebih dulu, lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari barat (Yunani) menurut beliau.³⁸

Pemikiran demokrasi substantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama, di antaranya adalah: 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, kesetaraan; 2) Kebebasan berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas publik; 3) Keadilan, dalam Islam perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah; 4) Toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. *Lakum dinukum waliyadin, Untukmu agamamu dan untukku agamaku*; 5) Musyawarah dalam pengambilan keputusan: sebagai bukti bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi antara lain dan terutama adalah adanya pemilihan umum.³⁹

E. Fungsi-Fungsi Lembaga Politik Dalam Islam

Fungsi lembaga politik dalam Islam adalah memastikan sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas empat hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), dan asas kebebasan (*al-huriyyah*).

³⁸ Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat" Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Vol. 5, No. 2, h. 567.

³⁹ Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat" Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Vol. 5, No. 2, h. 58.

1. Asas Persamaan (*Mabda al-musawah*)

Fungsi pertama dalam lembaga politik Islam adalah persamaan. Lembaga politik Islam harus memastikan asas persamaan diterapkan dalam pemerintahan Islam. Persamaan dalam fungsi lembaga politik Islam memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran agama Islam.⁴⁰

Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan pembawaan Islam yang berbeda sekali dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu,

⁴⁰ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010)h.31

yaitu Allah sehingga seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengakses kekuasaan.

2. Asas Keadilan (*al-adalah*)

Fungsi kedua dalam lembaga politik Islam adalah keadilan. Lembaga politik Islam harus memastikan Asas keadilan diterapkan dalam pemerintahan Islam. Secara doktrin, keadilan merupakan ciri khas Islam sebagai agama yang membedakannya dari agama-agama yang lainnya. Ketika agama yahudi terbedakan sebagai agama keras dan kristen sebagai agama cinta, Islam memiliki identitas khas sebagai agama adil. Secara operasional, identitas khas ini mewarnai setiap sub-sub ajarannya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.⁴¹

Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan diri setiap warga negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya. Setiap kekayaan yang terdapat diwilayahnya dapat diakses oleh semua orang, tanpa kecuali. Terkait dengan asas keadilan, hasil pengelolaan kekayaan alam oleh

⁴¹ *Ibid.*, h.42

negara harus terdistribusikan secara merata kepada semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari *maqasid syari'ah*. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa ada keadilan. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara. dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara.

3. Asas Musyawarah (*asy-syura*)

Fungsi ketiga dalam lembaga politik Islam adalah musyawarah. Lembaga politik Islam harus memastikan asas musyawarah diterapkan dalam pemerintahan Islam. Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam Al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa musyawarah adalah asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah *syura*'.⁴²

Dalam hadits Rasulullah Saw. Terdapat sebuah kata yang menunjukan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah Saw. Adalah *masyurah*. Menurut An-

⁴² *Ibid.*, h. 52

Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musayawah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan. Musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat muslim..⁴³

4. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

Fungsi keempat dalam lembaga politik Islam adalah Kebebasan. Lembaga politik Islam harus memastikan Asas kebebasan diterapkan dalam pemerintahan Islam. Kebebasan (*al-hurriyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat..⁴⁴

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang harus didapatkan oleh semua orang. Asas kebebasan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak dan pergi ke mana saja, tanpa takut ditangkap atau dipenjara. Tindakannya tidak boleh dihukum, kecuali karena hukum.

Beberapa warga negara yang harus dilindungi oleh negara dan bersifat umum adalah, kebebasan hak milik, kebebasan tempat tinggal,

⁴³ *Ibid.*, h.62

⁴⁴ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)., h.4.

kebebasan berakidah, kebebasan berpendapat, kebebasan berusaha, kebebasan belajar, kebebasan berpolitik. Asas kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam menyangkut dengan hak. Hak adalah sifat yang melekat pada seseorang dan mesti dipenuhi oleh pihak lain.⁴⁵

F. Aliran-Aliran Politik Dalam Islam

1. Aliran Revolusi

Islam sangat mengedepankan prinsip untuk menghormati privasi dan kepentingan pihak lain, Islam sangatlah ramah dengan prinsip non-intervensi, namun dalam batas tertentu penerimaan terhadap nalar non-intervensi tidak harus bermakna kepada penerimaan prinsip permisif. Dalam Islam sudah jelas mana hubungan yang dilandasi iktikad baik yang harus dijaga, mana hubungan yang dilandasi dengan iktikad buruk yang harus segera diakhiri.⁴⁶

Aliran Revolusioner Islam yang menyatakan oposisi mereka melalui revolusi, ketika menjelaskan legalitas pelaksanaan revolusi tersebut berdasar pada Al-Qur'an yang mewajibkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Penggunaan kekuatan untuk mengubah kemungkaran adalah suatu kewajiban yang memiliki prioritas pertama. Kasus ini diistilahkan dengan kisah Abu Bakar dalam rangka mewujudkan negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, hukum Islam tidak mengenal

⁴⁵ Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 31.

⁴⁶ Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), h.49.

kekuasaan tak terbatas dari pemerintah. Hukum Islam memandang bahwa kepala negara harus dibatasi. Maka ketika Abu Bakar dan para Khulafaur rasyidin diba'iat menjadi khalifah, beliau berpidato: "Ta'atlah kepadaku selama aku taat kepada Allah. Jika aku tidak taat kepada Allah, kalian tidak wajib taat kepada ku."⁴⁷

Pemilik pendapat ini mendasarkan pada firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah pada yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Imran [3]: 104)

Para pemilik kecenderungan revolusioner melihat bahwa jika *amar ma'ruf* telah berada pada batas *ad-da'watu bi illati hiya ahsan* (mengajak dengan cara yang lebih baik) maka *nahi mungkar*-nya telah melewati batasan, ini menuju tindakan yang menjamin berhentinya perbuatan mungkar tersebut. Rasulullah Saw. Bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِأُذُنٍ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِأُذُنٍ [رواه مسلم]

Artinya: "Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa

⁴⁷ Abdul Djalil dan Imam Nakha'i , *Fiqh Rakyat pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LkiS 2000) h. 21.

maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman”(H.R. Muslim)⁴⁸

Pada hadist ini mengubah kemungkaran dengan tangan, yakni dengan tindakan dan kekuatan lebih didahulukan dari pada cara-cara perubahan lainnya. Diantara makna *ats-saurah* (revolusi) adalah berhijrah dari kondisi menyerah dan diam ke kondisi bergerak dan memberontak. Hal tersebut berarti meninggalkan keterbelakangan dan kegelapan. Dalam hijrah ini manusia dan masyarakat meninggalkan situasi yang zalim dan kondisi sewenang-wenang tersebut kemudian menggantinya dengan kondisi dan situasi yang lebih cemerlang. Jadi hijrah tidak dipandang sebagai tindakan pasif yang dianggap oleh pengikut aliran revolusi sebagai kewajiban karena mereka tidak meninggalkan masyarakat yang zalim untuk kemudian mengubahnya berarti juga berbuat zalim pada diri mereka sendiri dan inilah puncak kezaliman sebab efeknya akan menimpa seluruh masyarakat, kepetingan dan nilai-nilai masyarakat.⁴⁹

Dari situlah tampak jelas sejauh mana dukungan Al-Qur'an terhadap masalah revolusi dalam menghadapi kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bahkan, mereka tertindas di negeri pun tidak lepas dari tanggung jawab kewajiban mengubah kezaliman. Hijrah merupakan salah satu cara perubahan tersebut. Itu karena kalau kita menerima logika penyerahan diri terhadap kesewenang-wenangan

⁴⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemahan Al-Wafi* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), h.407.

⁴⁹ Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h.383.

maka penyerahan diri tersebut berseberangan dengan kehendak Allah Swt. yaitu kehendak yang dikonsep Al-Qur'an pada sebuah ayatnya yang oleh sebagian pakar dilihat telah mengekspresikan makna dan kekuatan-kekuatan revolusioner. Khawarij dan beberapa kelompok Syiah mempresentasikan panji aliran revolusi secara ide dan praktiknya. Mereka berpendapat harus menggunakan kekerasan revolusi, kekuatan, dan pedang sebagai cara yang wajib dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam melawan kezaliman dan kerusakan.⁵⁰

2. Aliran Sabar

Sabar adalah paham mayoritas *Ahlusunnah* dan jalan mereka dalam menghadapi kezaliman, ketidakadilan, atau kesewenang-wenangan. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa bagi penguasa yang tidak adil akan mendapat dosa dan bagi seorang mukmin adalah bersabar. Sebenarnya tekanan keras yang menimpa oposisi Islam sepanjang masa turut bertanggung jawab sampai batas-batas sangat besar dalam mendukung prinsip sabar dan prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan ide tersebut, seperti ide *al-irja'* yang menghilangkan dosa tidak membela kebenaran dari pundak seorang mukmin. Itu karena beban akibat menjalankan kewajiban *amar makruf nahi mungkar* sangat besar sampai-sampai bersabar terhadap kemungkaran jauh lebih ringan daripada melarang adanya kemungkaran tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 237.

Tentu saja dalam menjalankan kewajiban *amar makruf nahi mungkar* bukanlah dilakukan dengan cara yang sembarangan tanpa melihat koridor syariat, ketika hendak melakukan *amar makruf nahi mungkar* harus dipikirkan terlebih dahulu *maslahah* dan *mudharat* yang akan ditimbulkan.⁵¹ Pada dasarnya, sabar bukanlah tingkah laku yang tidak menunjukkan oposisi seperti yang terlintas dalam pikiran. Begitu juga, revolusi pun tidak selalu menjadi cara paling ideal dalam menunjukan oposisi seperti yang terlintas juga dalam pikiran.⁵²

Sebuah tingkah laku untuk bisa dianggap menunjukkan oposisi itu berdasar pada sejumlah kondisi lain yang akan memberinya karakter tersebut atau tidak. Untuk mengenal hakikat madzhab sabar Islam dan memahami pemikiran aliran tersebut kita akan mulai dengan mendefinisikan makna sabar itu sendiri sebagai bentuk tingkah laku keislaman sehingga kita bisa mengukur lembah sabar dalam kapasitasnya sebagai ide keislaman yang memiliki maksud sangat dalam. Secara etimologis sabar memiliki makna tahan dalam menghadapi cobaan.⁵³ Sabar merupakan salah satu cara pengungkapan oposisi Islam adalah sabar yang bagaimanapun juga tidak menyetujui atau menerima legalitas serta konstitusionalnya kezaliman dan kesewenang-wenangan, tetapi ia berkaitan dengan

⁵¹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Sikap Ekstrim dalam Menyikapi Kemungkaran" (Online), tersedia di: <https://rumaysho.com/1025-sikap-ekstrim-dalam-menyikapi-kemungkaran202.html> (10 Mei 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁵² Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h. 306.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1237.

syarat *al-istitha'ah* (kemampuan) yang dinyatakan hadist, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” Jadi, sabar dalam kapasitasnya sebagai cara untuk mengungkapkan oposisi Islam adalah menahan jiwa dari apa yang diharuskan akal dan syariat agar tidak menyerah terhadap kemungkaran dan mentapkan konstitusionalnya.

Sesungguhnya konsistensi mayoritas *ahlusunnah* dalam memegang prinsip sabar merupakan bentuk dari kepatuhan mereka terhadap ketetapan dan perintah Allah sehingga apapun yang terjadi dalam sistem perpolitikan aliran ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. sebab sabar dalam Al-Qur'an pada kebanyakan ayat yang memuat kata itu disebut sebagai tindakan terpuji sehingga penyandanginya akan diberi pahala paling mulia karena ia telah patuh, konsisten dan tunduk terhadap hukum serta perintah Allah.⁵⁴

Sabar terhadap kemungkaran untuk mengantisipasi munculnya bahaya yang lebih besar adalah lebih baik daripada mencegah kemungkaran itu, yaitu memilih salah satu dari dua bahaya yang paling ringan. Jadi, sabar bagaimanapun juga bukan berarti mengakui legalitas atau konstitusionalnya kezaliman dan kemungkaran, melainkan adalah sikap yang dipaksakan oleh kondisi positif tertentu

⁵⁴Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012), h. 307.

sehingga bersabar merupakan sesuatu keistimewaan karena tidak ada jalan keluar kecuali hal itu. Sikap kelompok *Ahlusunnah* terbatas pada kewajiban *amar makruf nahi mungkar* dengan dakwah dan nasihat saja, atau bahkan pada saat tidak adanya kapabilitas cukup dengan pengingkaran di hati saja tanpa harus menghunus pedang, yaitu dengan revolusi.

3. Aliran Kapabilitas

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.⁵⁵

Aliran Kapabilitas hadir untuk memberi tambahan prinsip lain bagi revolusi Islam, yaitu prinsip kapabilitas sebagai syarat yang diharapkan demi keberhasilan oposisi revolusioner. Syarat ini terhitung sebagai reaksi atas pengamalan-pengamalan revolusi yang gagal karena tidak benar-benar menguasai sejumlah faktor penyebab keberhasilan revolusi. Untuk itu, penganut aliran ini memiliki ciri khas bahwa mereka akan bersabar sampai berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mensukseskan oposisinya.⁵⁶

Begitulah, aliran ini tampak sepertinya merupakan mediasi antara aliran revolusi dan sabar. Syarat kapabilitas muncul sebagai konsekuensi dari sejumlah kegagalan revolusi yang tidak ada persiapan cukup untuk kapabilitas. Untuk itu, syarat kapabilitas dibuat

⁵⁵ Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A., *Perilaku Organisasi* Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 56.

⁵⁶ Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012)., h. 383.

demikian menjamin suksesnya revolusi. Amr bin Ubaid salah seorang Mukhtazilah pada masa Mansur Abbasi yang mensyaratkan kapabilitas dan sempurnanya syarat-syarat pemberontakan. Kebetulan tekadnya ini muncul karena kegagalan yang menimpa revolusi Zaid bin Ali 122 H, revolusi Yahya bin Zai tahun 125 H, dan revolusi Yazid Bin Walid tahun 126 H.

Untuk itu sepanjang hidupnya, oposisi yang ia lakukan sebatas memutuskan dan menolak bekerjasama dengan negara tanpa mengadakan pemberontakan karena tidak ada syarat kapabilitas. Syarat kapabilitas merupakan garis tengah antara menyerah, sabar, dan menunggu solusi dari langit dengan pemberontakan dan revolusi yang belum dipelajari. Untuk itu, kita bisa mengatakan bahwa seluruh mazhab keislaman telah mengekspresikan syarat tersebut dengan berbagai bentuk. Aliran-aliran revolusioner melihat terwujudnya syarat ini jika sudah terdapat fasilitas dan potensi serendah apapun, sedangkan aliran sabar menunggu melihat bahwa syarat tersebut membutuhkan sejumlah banyak faktor untuk dapat mewujudkannya.⁵⁷

Aliran-aliran tersebut dengan segala kekuatan mendukung oposisi selama oposisi tersebut legal. Perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara mereka membawa kedalam berbagai aliran yang berasal dari ijtihad-ijtihad pemikiran dan pengalaman-pengalaman

⁵⁷ *Ibid.*, h. 385.

historis. Abu hanifah dan Muktazilah merupakan dua panji utama dalam aliran kapabilitas.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa semua aliran keislaman tidak menentang prinsip oposisi, selagi oposisi yang dilakukan tersebut dalam rangka mencegah suatu kebijakan yang kiranya dapat mencederai kepentingan rakyat, oposisi dilaksanakan bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan ataupun mencari-cari kelemahan pemerintahan yang sedang berkuasa, tetapi lebih kepada bersikap tegas terhadap kedzaliman, dapat dikatakan tegas disini ialah ketika tidak malu mendukung kebijakan pemerintah jika dipandang tepat, dan sebaliknya tidak takut untuk mengkritik suatu kebijakan jika dipandang salah.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Prasetyo, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Dalam skripsinya dengan judul “Model Oposisi Partai di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Tahun 2014-2017”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model oposisi partai politik di Indonesia, kemudian menjelaskan dan

menganalisis respons Gerindra dan PKS sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pembahasan RUU Pemilu dan Hak Angket KPK dan RUU *Tax Amnesty*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis selain itu peneliti juga melakukan wawancara (*Field Research*). Data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian tersebut bersifat primer dan bersifat sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model oposisi yang diadopsi oleh Gerindra dan PKS adalah oposisi spesifik, yaitu oposisi yang bertujuan mengoreksi atau melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan tertentu tanpa menolak rezim, para pemimpin, maupun kebijakan utama yang dikeluarkan pemerintahan. Sementara pada kasus *Tax Amnesty*, Gerindra dan PKS sama-sama menyetujui usulan pemerintah tersebut. Walaupun menerima, Gerindra dan PKS justru partai yang memberikan tanggapan dan kritik serta catatan pada pemerintah terkait *Tax Amnesty*.

Penelitian kedua yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019. Dalam skripsinya yang berjudul "Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui eksistensi partai Gerindra sebagai partai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah tentang partai oposisi

dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi: *editing* dan *systematizing*. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dan menggunakan teknik berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Gerindra sebagai oposisi adalah kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Adapun gerakan oposisi di Indonesia yang dilakukan oleh partai Gerindra merupakan sikap penentangan terhadap kesewenangan pemerintah yang berkuasa.

Penelitian selanjutnya yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Firman Noor dalam artikel jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, Juni 2016 yang berjudul “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguat Demokrasi di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi melalui pembangunan oposisi, artikel tersebut mengarahkan kepada upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti oposisi dan revitalisasi partai politik. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran yang lebih tepatkan demokrasi dan oposisi di

level masyarakat dan meningkatkan kapabilitas partai dalam melaksanakan peran demokratiknya, termasuk kemampuan partai dalam beroposisi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hasyim dalam jurnal Rausyan Fikr, Vol. 12 No. 2, Desember 2016, dengan judul “Oposisi Perspektif Al-Qur’an”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun di dalam Al-Qur’an tidak ada kata yang bermakna oposisi, namun secara konseptual makna oposisi dapat dijumpai pada ayat-ayat yang berhubungan dengan *amar ma’ruf nahi munkar* atau saling menasihati. Disamping itu Al-Qur’an telah memaparkan contoh pemimpin yang bersifat otoriter yang tidak mau menerima nasihat, saran, ataupun kritikan seperti Fir’aun yang pada puncak keotoriterannya telah menganggap dirinya sendiri sebagai tuhan. Sekalipun karakter Fir’aun demikian Al-Qur’an tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengatakan yang benar kepadanya dengan penuh etika. Idealnya cara beroposisi yang ditempatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk beroposisi.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Pertama, judul yang penulis angkat berbeda dengan beberapa penelitian di atas. Penelitian yang pertama membahas mengenai “eksistensi” partai oposisi, penelitian yang kedua membahas mengenai “model Oposisi partai di Indonesia”. Penelitian ketiga lebih mengarah kepada arti penting keberadaan oposisi sebagai bagian penguat demokrasi di Indonesia. Dan penelitian yang terakhir membahas mengenai oposisi dalam sudut pandang Al-Qur’an saja. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai “Peran

Oposisi” dalam sistem politik Indonesia yang dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian pertama dan kedua, penelitian yang penulis lakukan berada pada rentang waktu pasca pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu pada masa periode Jokowi-Ma'ruf, sedangkan kedua penelitian tersebut dilakukan pada masa periode Jokowi-JusufKalla.



DAFTAR PUSTAKA

- Admojo, Tuswoyo, *“Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014”* Jurnal Politik Vol. 1, No. 2, 2016.
- Adnan, Mohammad, *“Wajah Islam Periode Makkah-Madinah dan Khulafaurrasyidin”* Cendikia Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No. 1, 2019.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Terjemahan Al-Wafi*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *Al Siyasa al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut, Dar al Arubah: 2001.
- Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Ombak 2012.
- Dahl, Robert, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta : PT. Aku Bisa 2014.
- Djalil, Abdul dan Imam Nakha'i, *Fiqh Rakyat pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta : LkiS, 2000.
- Efriza, *Political Explore*, Alfabeta : Bandung 2012.

Faizal, Ahmad. 2016. *Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim*. Skripsi. Program Sarjana Siyasah Jinayah UIN Walisongo, Semarang.

Hanan,Djayadi. “*Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*”, Jakarta: Mizan, 2014.

Iqbal,Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal, Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam*, Yogyakarta : LkiS 2012.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, Bandung: Maju Mundur, 1990.

Madjid, Nurcholis. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Marbun, B.N, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Marzuki,Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*,Erlangga : Jakarta 2014.

MD, Mahfud,*Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1979.

Nata, Abudin. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006.

Pamungkas,Sri Bintang. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, Erlangga : Jakarta 2001.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Puspita, Yana, “Analisis Politik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

- Rahman, A. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2007.
- Rahardjo, Sajipto, *ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Iakti: 2001.
- Raymond, Henry dan Singgih Agung, *Politik Kewarganegaraan*, Jakarta : Erlangga 1999.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1).
- Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A, *Perilaku Organisasi Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumitro,Warkum, dkk, *Politik Hukum Islam*, Malang, UB Press : 2014.
- Suntana, Ija, *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- , *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Surwandono dan Sidiq Ahmadi , *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2011.
- Syafii, Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Adi Tama : Bandung 2008.
- Syamsuddin, Haris. “*Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensi Penataa Kembali Relasi Presiden- DPR*”, dalam *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Jakarta: Pustaka Pelajar dan AIPI, 2009.
- Ubaedillah, A. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Uhlin, Andres, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung : Mizan 1998.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo 2011.

Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Zuhraeni, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12, No.1, 2014.

Sumber Internet

Cegah Demokrasi Otoriter, PKS Setia Jadi Oposisi (On-line), tersedia di: <http://pks.id/content/cegah-demokrasi-otoriter-pks-setia-jadi-oposisi> (10 Mei 2020).

Kompas, “Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri Pertahanan” (On-line), tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/08384611/prabowo-ditunjuk-jadi-menteri-pertahanan> (10 Mei 2020).

Kritik 12 Wakil Menteri (On-line), tersedia di : <http://partaipan.or.id> (27 Februari 2020).

Kritik Defisit Anggaran (On-line), tersedia di : <http://partaipks.id> (28 Februari 2020).

Kritik Dewan Pengawas KPK (On-line), tersedia di : <http://partaipks.id> (26 Februari 2020).

Kritik Kenaikan BPJS (On-line), tersedia di : <http://partaipan.or.id> (27 Februari 2020).

Muhammad Abduh Tuasikal, “Sikap Ekstrim dalam Menyikapi Kemungkaran” (On-line), tersedia di: <https://rumaysho.com/1025-sikap-ekstrim-dalam-menyikapi-kemungkaran202.html> (10 Mei 2020).

Sejarah Partai Amanat Nasional (On-line), tersedia di : <http://partaipan.or.id> (25 Februari 2020).

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (On-line), tersedia di : <http://partaipks.id> (26 Februari 2020).

Visi dan Misi Partai Amanat Nasional (On-line), tersedia di : <http://partaipan.or.id> (25 Februari 2020).